

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan izin-Nya jugalah sehingga Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017-2021 dapat tersusun sesuai dengan waktunya. Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja perangkat daerah menuju *good governance*.

Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan publik. Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi kepala daerah kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2017-2021, yang disertai dengan program prioritas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam. Adapun pedoman yang dipakai adalah RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2017-2021. Renstra ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2017- 2021. Dengan disusunnya Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.

Lubuk basung, Februari 2017
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

HENDRI.G,SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP.19640216 199202 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam merupakan salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Agam telah menyusun Renstra Perangkat Daerah-nya dan telah dilakukan penetapan. Dikarenakan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Agam, diperlukan penyusunan Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam agar tercipta sinkronisasi, sinergisitas dan harmonisasi dalam penetapan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan guna pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Agam periode 2017-2021

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten. (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
13. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
14. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 547)
15. Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

16. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Agam tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11)
17. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 tahun 2016, tentang Perubahan Organisasi Perangkat;
19. SE Mendagri No.050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2017.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam adalah Menjadi pedoman dan acuan dalam pengelolaan keuangan dan aset selama 5 (lima) tahun guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Agam periode 2017-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Adapun Tujuan penyusunan Renstra Badan Daerah Kabupaten Agam adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan
3. Mengoperasionalkan Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sehingga tujuan dan sasaran yang dicita-citakan dapat tercapai
4. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - 2.2 Sumber Daya
 - 2.3 Kinerja Pelayanan
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV. Tujuan dan Sasaran
 - 4.1. Tujuan
 - 4.2. Sasaran
- Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan
 - 5.1. Strategi
 - 5.2. Arah Kebijakan
- Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 68 tahun 2016 tentang tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Keuangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Badan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang keuangan:

- a. Perumusan kebijakan di bidang keuangan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan
- d. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2.1.3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. Bidang Perencanaan Anggaran, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pengelolaan Belanja PPKD.
- d. Bidang PAD I, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bidang Perencanaan dan Peningkatan PAD
- e. Bidang PAD II, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
 - 2) Sub Bidang Pengolahan data dan Penetapan; dan
 - 3) Sub Bidang Penagihan dan Keberata

- f. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan Belanja dan Pembinaan Keuangan Daerah; dan
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan Kas Daerah.
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi
 - 1) Sub Bidang Akuntansi;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD; dan
 - 3) Sub Bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah.
- h. Bidang Aset Daerah, membawahi
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan;
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan Aset; dan
 - 3) Sub Bidang Pendayagunaan Aset.
- i. UPT; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah dilengkapi dengan tenaga sebanyak 58 rang yang terdiri dari PNS sebanyak 37 orang dan Non PNS (PTT, Kontrak sebanyak 11 orang, dan Jasa Perorangan sebanyak 19 orang).

Tabel Status dan Strata Pendidikan Pegawai

NO	Status	S2		S1		D3		SLTA		SLTP		SD		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	PNS	4	1	7	18	5	3	4	3	-	-	-	-	20	25
2	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PTT	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
4	Tenaga Kontrak	-	-	-	4	2	-	3		-	-	-	-	5	4
5	Jasa Perorangan	-	-	4	5	-	-	3	7	-	-	-	-	7	12
	Jumlah	4	1	12	29	7	3	10	10	-	-	-	-	33	43

Tabel Status dan Pangkat/Golongan Pegawai

NO	Status	I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	PNS	-	-	-	-	-	-	5	3	8	8	8	8	3	1	1	-	45
2	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tahun 2018, tingkat pendidikan tertinggi pegawai yang berstatus PNS di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam adalah S2 sebanyak 5 orang (9% dari PNS). Selanjutnya pegawai dengan pendidikan S1 adalah 25 orang (56%), D3 8 orang (18%), SLTA/Sederajat 7 orang (16%), SLTP/ Sederajat 0 orang (0%) dan SD 0 orang (0%).

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan dalam upaya pengelolaan keuangan daerah, adapun beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan akan digambarkan sebagaimana berikut:

2.3.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Beberapa kegiatan yang tercakup dalam program ini adalah:

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah pengaturan, pengawasan dan pembayaran penggunaan telpon, listrik, air dan jaringan internet Badan Keuangan Daerah.

b. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran pekerjaan.

c. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Kegiatan ini bertujuan agar Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam dapat berkoordinasi dan berkonsultasi tentang peraturan atau ketentuan baru maupun informasi lain di bidang Badan Keuangan Daerah yang dilaksanakan ditingkat provinsi maupun di tingkat pusat.

d. Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi dan pelaporan untuk perbaikan dan penyempurnaan sekaligus percepatan serapan/ sebaran APBD menuju pelaksanaan program kegiatan pembangunan di kabupaten Agam yang efisien, efektif dan akuntabel.

e. Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur negara agar terciptanya kelancaran setiap pelayanan pada Badan Keuangan Daerah. Pada kegiatan ini mencakup pembayaran tenaga PTT/Kontrak, sopir, tenaga kebersihan sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia. Begitu juga kebutuhan operasional kantor termasuk perawatan kendaraan operasional.

f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pada Badan Keuangan Daerah diperlukan tambahan sarana dan prasarana kantor secara bertahap, kebutuhan tersebut dipenuhi melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor.

2.3.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Beberapa kegiatan yang tercakup dalam program ini adalah :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana kendaraan dinas untuk pemungutan PAD pada Badan Keuangan Daerah serta OPD pengelola PAD.

2.3.3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Beberapa kegiatan yang tercakup dalam program ini adalah :

a. Penyusunan Standar Satuan Harga

Dalam penyusunan rencana kerja anggaran pada masing-masing OPD khususnya untuk pengadaan diperlukan suatu acuan yang jelas agar pengguna anggaran dapat dilakukan seefektif mungkin. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan suatu Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja yang jelas terhadap harga satuan dalam bentuk buku Standar Satuan Harga.

b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Kegiatan ini adalah membuat rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Agam dan peraturan Bupati Agam tentang penjabaran APBD, perubahan APBD serta mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

c. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan yang baik pada masing-masing unit kerja dan sub unit kerja di lingkungan pemerintah kabupaten agam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan perubahan pertama Permendagri nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri nomor 21 tahun 2011 serta Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standard akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah, membutuhkan Sumber Daya Manusia yang handal, serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang telah memanfaatkan aplikasi SIPKD yang akan saling terintegrasi dengan aplikasi pendukung, yaitu aplikasi e-PAD, aplikasi Aset, aplikasi Gaji, Aplikasi JKN, aplikasi PBB dan BPHTB.

d. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten agam. Dalam penyusunan LKPD untuk aset tetap bersumber dari laporan aset seluruh OPD. Untuk bimbingan teknis pengelolaan Barang Milik Daerah pesertanya berasal dari pengurus barang seluruh OPD serta aplikasi laporan aset tetap dan Inventarisasi Barang Milik Daerah bersumber dari data aser seluruh SKPD.

e. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan objek pajak daerah oleh OPD dan terlaksananya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sekaligus terealisasinya pencapaian target penerimaan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Agam.

f. Pengelola Belanja Bantuan Keuangan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka merealisasikan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada nagari, bagi hasil pajak dan retribusi kepada pemerintah nagari, bantuan partai politik, belanja tidak terduga dan membuat pedoman pelaksanaan APBD serta pedoman belanja PPKD.

g. Pengelola Belanja Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah terhadap SP2D organisasi perangkat daerah se kabupaten agam.

h. Peningkatan Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik yang didukung dengan ketersediaan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan pada seluruh SKPD. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pembinaan terhadap pengelola keuangan SKPD mengenai akuntansi pengelola keuangan daerah yang diterapkan melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) baik secara langsung proses rekonsiliasi data keuangan dan asset OPD yang rutin dilaksanakan setiap bulannya,maupun melalui media komunikasi, sehingga diharapkan pengelola keuangan yang dapat menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

i. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan sector Perkotaan (PBB P2) merupakan kontribusi wajib bagi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pengelolaan PBB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan Kabupaten Agam dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

j. Pendayagunaan Aset

Kegiatan Penyusunan Peningkatan Pendayagunaan Aset adalah Kegiatan dalam lingkup pemeliharaan penghapusan, lelang dan penyusunan regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

k. Peningkatan dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tujuan dari Kegiatan ini adalah terlaksananya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Agam

l. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pendapatan

Tujuan dari Kegiatan ini adalah terlaksananya pelaporan terhadap penerimaan daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah disetiap bulannya dan terlaksananya evaluasi terhadap capaian penerimaan setiap periode

m. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan dan pemberian Bimbingan Teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menghasilkan Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk menentukan alternative yang dibutuhkan oleh daerah dan melaksanakan kegiatan rapat tim penyelesaian kerugian daerah.

n. Pemutakhiran Data PBB-P2

Pelaksanaan pengelolaan PBB P2 merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan Kabupaten Agam dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

o. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan Daerah pada organisasi perangkat daerah se Kabupaten Agam

p. Pengelolaan Data PBB-P2 dan BPHTB

Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya cetak SPPT PBB P2, didistribusikan ke Wajib Pajak se Kabupaten Agam dan dipungutnya PBB P2 serta dicetaknya SSPD BPHTB dan terealisasinya penerimaan BPHTB Kabupaten Agam melebihi target yang telah ditetapkan

2.4. Tantangan Dan Peluang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

2.4.1. Tantangan (Threat)

- a. Masih rendahnya sumber daya manusia pelaksana pengelola keuangan daerah
- b. Kurangnya tenaga PNS pengelola keuangan daerah pada OPD
- c. Kurangnya komitmen atasan dalam pelaksanaan pengelola keuangan daerah
- d. Kewenangan dalam penerimaan PAD sebagian sudah di limpahkan ke provinsi dan pemerintah pusat
- e. Wajib pajak kurang peduli atas kewajiban dalam membayar pajak

2.4.2. Peluang (Opportunis)

- a. Tersedianya regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
- b. Tersedianya aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah
- c. Peningkatan SDM OPD dalam pengelolaan keuangan daerah
- d. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah
- e. Menghitung kembali potensi-potensi pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Merevisi perda dan perbup tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak lagi sesuai dengan regulasi saat ini

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS

1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Setelah dilakukan analisis secara seksama maka teridentifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam dalam melakukan pengelolaan keuangan dan asset. Permasalahan yang paling nampak dihadapi saat ini adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman SDM pengelolaan keuangan dan asset terhadap regulasi pengelolaan keuangan dan asset belum memadai.
2. Penguasaan SDM pengelola keuangan terhadap teknologi informasi khususnya sistem informasi pengelolaan keuangan dan asset masih kurang memadai.
3. Belum optimalnya penggunaan Satuan Standar Harga Barang dan Jasa dan belum diterapkannya Analisis Standar Biaya (ASB) dalam penyusunan anggaran.
4. Belum adanya hasil evaluasi indikator kinerja sebagai input perencanaan penganggaran tahun berikutnya.
5. Dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan outcome yang dikehendaki.
6. Pencairan anggaran tidak sesuai dengan aliran kas sehingga terjadi penumpukan anggaran di triwulan IV.
7. Tingkat pemahaman penatausahaan keuangan di masing-masing SKPD masih rendah.
8. Verifikator SKPD belum optimal dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan secara administrasi maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
9. Terkait dengan Bentuk pemanfaatan aset yang optimal, permasalahan yang dihadapi adalah belum teridentifikasi asset idle yang terdapat di SKPD.
10. Penyusunan RKBMD baik pengadaan maupun pemeliharaan mengacu daftar inventaris barang serta standar sarana dan prasarana sebagai dasar pengalokasian anggaran.
11. Terdapat aset tanah yang belum bersertifikat.
12. Masih rendahnya komitmen SKPD dalam menindaklanjuti temuan-temuan LHP BPK RI.
13. Belum optimalnya pengakuan terhadap reward and punishment.

1.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Agam terpilih yang juga Misi Bupati dan Wakil Bupati Agam Terpilih yang juga ditetapkan sebagai Visi Kabupaten Agam Tahun 2016-2021 yakni : **“Terwujudnya masyarakat Kabupaten ‘Agam Mandiri dan Berprestasi yang Madani”**. Dalam rangka pencapaian Visi tersebut telah ditetapkan 4 (empat) Misi pembangunan daerah yang satu sama lain saling menguatkan dan bersinergi, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kehidupan beragama dan norma adat berlandaskan prinsip adat basandi syarak , syarak basandi kitabullah
2. Mewujudkan tata Pemerintahan yang baik, bersih (Good and Clean Government) dan Profesional
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat beriman dan berkarakter
4. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif
6. Pembangunan berkelanjutan , berwawasan lingkungan, tata ruang, mitigasi bencana dan menjadikan agam sebagai destinasi pariwisata unggulan
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan social

Dari ketujuh Misi di atas, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Misi yang relevan sebagai acuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam menyusun rencana strategisnya yakni Misi Kedua **“Mewujudkan tata Pemerintahan yang baik, bersih (Good and Clean Government) dan Profesional”**

1.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Pada Program Pembangunan Nasional tercantum Visi Kementerian Keuangan yaitu: **“Menjadi Pengelola Keuangan yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”**, berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah 24 keuangan Negara dan mengelola kekayaan Negara.

Sedangkan pada program pembangunan Provinsi Sumatera Barat tercantum visi **“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**. Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMD dan RPJMN Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dengan rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut .

Madani

Sumatera Barat Madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan Negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual

Sejahtera

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang" pangan" perumahan" air bersih" kesehatan"pendidikan" pekerjaan" rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik" lingkungan hidup dan sumber daya alam" berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik" mempunyai akses terhadap informasi .

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Agam dituangkan setiap tahunnya dalam bentuk peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan oleh setiap SKPD berdasarkan anggaran kinerja.

1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah di pertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini.

Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program "lebih hijau" dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negative terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary principles, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan.

KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program.

1.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam hal penentuan isu-isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam kedalam pola analisis SWOT.

Untuk mencapai hasil konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu strategi yang menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran yang konseptual, analitis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Identifikasi dan analisa dilakukan dengan pendekatan SWOT yaitu berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal serta perpaduan diantara dua kondisi tersebut, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Internal :

1. Kekuatan/potensi (Strength)

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 2) Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3) Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 4) Personil berasal dari unit yang membidangi urusan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

- 5) Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kelemahan (Weaknes)

- 1) Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen, serta prasarana penunjang kerja berupa gedung dan ruangan dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari dan pemberian layanan secara optimal kepada pihak yang berkepentingan.
- 2) Belum terpenuhinya bezetting formasi apabila dibandingkan dengan beban kerja yang ada, sehingga terjadi perangkapan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan transparan.
- 4) Belum optimalnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
- 5) Masih rendahnya minat, motivasi dan pemahaman personil terhadap peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset.
- 6) Belum Optimanya transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada e-government dan e-budgeting.

Faktor Eksternal

1. Kesempatan/Peluang (Opportunity)

- 1) Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 2) Adanya lembaga pemerintahan dan swasta yang mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi serta kompetensi personil.
- 3) Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik
- 4) Adanya kesamaan tekad, pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh SKPD dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan di bidang keuangan dan aset daerah.
- 5) Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

2. Tantangan/Ancaman (Treath)

- 1) Peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset daerah cenderung berubah-ubah dalam waktu cepat.
- 2) Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good corporate governance.
- 3) Masih rendahnya kemampuan aparat pengelola keuangan dan aset daerah SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menurut ketentuan yang berlaku.

Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berlandaskan tujuan dan sasaran pada RPJMD guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Agam beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Tahun 2017 - 2021

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	2017	2018	2019	2020	2021
1	Peningkatan pengelola keuangan daerah dan aset secara terpadu	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset	1. Mempertahankan Opini WTP atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2. Peningkatan target PAD dari realisasi 2 tahun sebelumnya	101.455.139.076	106.081.197.746	117.952.590.279	129.747.849.306	142.722.634.236

Lubuk Basung, Februari 2017
BADAN KEUANGAN DAERAH

HENDRI.G.SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640216 199202 1 001

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2017-2021.

Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara mencapai sasaran sebagaimana ditunjukkan oleh indikator kinerja sasaran. Adapun strategi dan kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Keuangan Daerah
Tahun 2017 - 2021**

VISI RPJMD : Terwujudnya Kabupaten Agam yang Berkeadilan, Inovatif, Sejahtera, Agamais dan Beradat Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani				
MISI II : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih (Good and Clean Government) dan profesional				
No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan meningkatnya kinerja keuangan daerah Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja keuangan daerah	Mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan Pengembangan sistim pengelolaan keuangan dan aset daerah terpadu 2. Revisi perda retribusi daerah dan pajak daerah 3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah 4. Menurunkan persentase belanja pegawai dalam belanja langsung 5. Pengelolaan keuangan melalui teknologi informasi

Lubuk Basung, Februari 2017
BADAN KEUANGAN DAERAH

HENDRI.G.SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640216 199202 1 001

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam merupakan program prioritas yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2017-2021 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam. Program dan indikator kinerja (outcome) serta indikasi pagu anggarannya selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam maka program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2017-2021 adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Agam. Selain itu dilaksanakan pula program-program rutin lainnya sebagai penunjang pencapaian kinerja program prioritas. Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam dijabarkan dalam dibawah ini :

Rencan Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.276.502.600,00	2.207.197.806,00	2.276.502.600,00	2.428.700.350,00	3.623.982.800,00	2.276.502.600,00	3.723.982.800,00	2.276.502.600,00	3.823.982.800,00	3.623.982.800,00				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Output : Lancarnya sarana Komunikasi dan sarana Penerangan		61.062.000,00	53.676.805,00	61.062.000,00	43.000.000,00	104.800.000,00	61.062.000,00	119.800.000,00	61.062.000,00	134.800.000,00	104.800.000,00			Sekretariat	Kabupaten Agam
				Indikator Outcome : Tepenuhinya Informasi Komunikasi dan Data															
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indikator Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor DPPKA		239.705.850,00	235.658.300,00	239.705.850,00	186.363.000,00	203.934.800,00	239.705.850,00	218.934.800,00	239.705.850,00	233.934.800,00	203.934.800,00			Sekretariat	Kabupaten Agam
				Indikator Outcome : Tersedianya pelayanan Perkantoran secara Optimal															
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Indikator Output : Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi		852.032.000,00	839.629.109,00	852.032.000,00	672.000.000,00	688.460.650,00	852.032.000,00	703.460.650,00	852.032.000,00	718.460.650,00	688.460.650,00			Sekretariat	Kabupaten Agam
				Indikator Outcome : Terpenuhiya Kebutuhan Operasional Perkantoran															
			Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Indikator Output : tersedianya Penunjang operasional Administrasi Perkantoran		427.079.750,00	419.661.410,00	427.079.750,00	154.337.350,00	1.558.337.350,00	427.079.750,00	1.573.337.350,00	427.079.750,00	1.588.337.350,00	1.558.337.350,00			Sekretariat	Kabupaten Agam
				Indikator Outcome : Terpenuhiya Kebutuhan Operasional Perkantoran															
			Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Indikator Output : Tersedianya Operasional Jasa Perkantoran		549.338.000,00	518.771.882,00	549.338.000,00	953.000.000,00	968.450.000,00	549.338.000,00	983.450.000,00	549.338.000,00	998.450.000,00	968.450.000,00			Sekretariat	Kabupaten Agam
				Indikator Outcome : Terpenuhiya Kebutuhan Operasional Perkantoran															
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indikator Output : Indikator Outcome : Terpenuhiya secara bertahap kebutuhan sarana dan prasarana kantor		147.285.000,00	139.800.300,00	147.285.000,00	420.000.000,00	100.000.000,00	147.285.000,00	125.000.000,00	147.285.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00			Sekretariat	Kabupaten Agam
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					400.000.000,00		-	-	400.000.000,00		400.000.000,00					
			Pengadaan Kendaraan Dinas	Indikator Output : tersedianya kendaraan dinas Ops SKPD					400.000.000,00			400.000.000,00		-	400.000.000,00			Sekretariat	Kabupaten Agam
				Indikator Outcome : Terwujudnya kelancaran Ops SKPD															

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			5.376.401.850,00	5.051.188.444,00	5.376.401.850,00	6.681.000.000,00	6.921.000.000,00	5.376.401.850,00	7.176.558.452,00	5.376.401.850,00	7.416.558.452,00	6.921.000.000,00				
			Penyusunan Standar Satuan Harga	Indikator Output : Buku HSBJ,DRKBU, DRKPBU,DKBU dan DKPBU		83.324.350,00	77.053.700,00	83.324.350,00	162.000.000,00	177.000.000,00	83.324.350,00	193.355.000,00	83.324.350,00	208.355.000,00	177.000.000,00			Bidang Aset	Kabupaten Agam
				Indikator Outcome : Terselenggaranya keseragaman satuan harga dalam penyusunan RKA dan DPA															
			Penyusunan Ranperda tentang APBD	Indikator Output : Buku HSBJ,DRKBU, DRKPBU,DKBU dan DKPBU		473.849.500,00	470.475.460,00	473.849.500,00	488.000.000,00	503.000.000,00	473.849.500,00	519.005.000,00	473.849.500,00	534.005.000,00	503.000.000,00			Bidang Perencanaan Anggaran	Kabupaten Agam
				Indikator Outcome : Terselenggaranya keseragaman satuan harga dalam penyusunan RKA dan DPA															
			Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Indikator Output : tersedianya informasi keuangan daerah/dokumen keuangan daerah		595.004.000,00	547.876.370,00	595.004.000,00	492.000.000,00	507.000.000,00	595.004.000,00	523.671.500,00	595.004.000,00	538.671.500,00	507.000.000,00			Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Kabupaten Agam
				Indikator Outcome : terlaksananya pengelola keuangan daerah															
			Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Indikator Output : Laporan Aset tetap		226.714.500,00	208.241.600,00	226.714.500,00	269.000.000,00	284.000.000,00	226.714.500,00	299.299.900,00	226.714.500,00	314.299.900,00	284.000.000,00			Bidang Aset	Kabupaten Agam
				Indikator Outcome : Terlaksananya Manajemen barang milik daerah															
			Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Indikator Output : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		250.442.500,00	209.532.700,00	250.442.500,00	546.000.000,00	561.000.000,00	250.442.500,00	576.600.952,00	250.442.500,00	591.600.952,00	561.000.000,00			Bidang PAD I	Kabupaten Agam
				Indikator Outcome : Peningkatan Pendapatan Daerah															
			Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan	Indikator Output : Perda Bupati ttg pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan		37.033.650,00	35.029.600,00	37.033.650,00	60.000.000,00	75.000.000,00	37.033.650,00	90.764.800,00	37.033.650,00	105.764.800,00	75.000.000,00			Bidang Perencanaan Anggaran	Kabupaten Agam
				Indikator Outcome : Tepatnya sasaran pembayaran bantuan keuangan sesuai Peraturan Bupati															

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pengelolaan Belanja Daerah	Indikator Output : Terbitnya SP2D SKPD, Pembinaan Bendahara Pengeluaran		854.402.400,00	833.958.700,00	854.402.400,00	342.000.000,00	357.000.000,00	854.402.400,00	372.773.500,00	854.402.400,00	387.773.500,00	357.000.000,00			Bidang Perbendaharaan	Kabupaten Agam
				Indikator Outcome : Lancarnya Proses Pengeluaran daerah															
			Peningkatan Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Indikator Output : Terlatihnya tenaga akuntansi SKPD dan PPKD dalam penyusunan laporan keuangan		127.303.000,00	114.494.438,00	127.303.000,00	320.000.000,00	335.000.000,00	127.303.000,00	350.069.000,00	127.303.000,00	365.069.000,00	335.000.000,00			Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Kabupaten Agam
				Indikator Outcome : Laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan pemerintah daerah															
			Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	Indikator Output : Pelaksanaan Intensifikasi Pemungutan PBB		942.965.000,00	925.971.993,00	942.965.000,00	756.000.000,00	771.000.000,00	942.965.000,00	790.060.000,00	942.965.000,00	805.060.000,00	771.000.000,00			Bidang PAD II	Kabupaten Agam
				Indikator Outcome : Peningkatan Pendapatan Asli daerah															
			Pendayagunaan Aset	Indikator Output : Premi Asuransi Barang Milik Daerah, daftar Aset yang dihapus		808.422.050,00	765.546.798,00	808.422.050,00	1.410.000.000,00	1.425.000.000,00	808.422.050,00	1.441.532.000,00	808.422.050,00	1.456.532.000,00	1.425.000.000,00			Bidang Aset	Kabupaten Agam
				Indikator Outcome : terlaksananya pengamanannya barang milik daerah															
			Peningkatan dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Indikator Outcome : terlaksananya pemungutan pajak dan retribusi daerah		236.231.000,00	220.813.900,00	236.231.000,00	165.000.000,00	180.000.000,00	236.231.000,00	195.169.900,00	236.231.000,00	210.169.900,00	180.000.000,00			Bidang PAD I	Kabupaten Agam
				Indikator Output : terpungutnya pajak dan retribusi daerah															
			Penyusunan Laporan dan evaluasi Pendapatan	Indikator Output : terpungutnya pajak dan retribusi daerah		200.492.000,00	170.391.450,00	200.492.000,00	172.000.000,00	187.000.000,00	200.492.000,00	202.775.500,00	200.492.000,00	217.775.500,00	187.000.000,00			Bidang PAD I	Kabupaten Agam
				Indikator Outcome : Laporan pendapatan Kabupaten Agam															
			Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Indikator Output : Tersedianya Perda Perhitungan APBD, Perbup ttg Perhitungan APBD dan laporan		226.726.900,00	216.289.600,00	226.726.900,00	414.000.000,00	429.000.000,00	226.726.900,00	444.800.000,00	226.726.900,00	459.800.000,00	429.000.000,00			Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Kabupaten Agam
				Indikator Outcome : 300 buah buku															
			Pemutakhiran Data PBB-P2	Indikator Output : Tersedianya Data dan informasi PBB-P2		158.476.000,00	129.393.610,00	158.476.000,00	261.000.000,00	276.000.000,00	158.476.000,00	291.489.800,00	158.476.000,00	306.489.800,00	276.000.000,00			Bidang PAD II	Kabupaten Agam
				Indikator Outcome : Tersedianya data PBB-P2 yang Up to Date															

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Sosialisasi dan BinteK Standar Akuntansi Pemerintahan	Indikator Output : Terlaksananya Pengelolaan Keuangan SKPD yang sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan		56.195.000,00	33.100.800,00	56.195.000,00	375.000.000,00	390.000.000,00	56.195.000,00	405.212.050,00	56.195.000,00	420.212.050,00	390.000.000,00			Bidang Perbendaharaan	Kabupaten Agam
				Indikator Outcome : Terlatihnya Pengelola Keuangan SKPD															
			Pengelolaan data PBB P2 dan BPHTB	Indikator Output : Peningkatan Pendapatan Asli daerah		98.820.000,00	93.017.725,00	98.820.000,00	449.000.000,00	464.000.000,00	98.820.000,00	479.979.550,00	98.820.000,00	494.979.550,00	464.000.000,00			Bidang PAD II	Kabupaten Agam
				Indikator Outcome : operasional Peningkatan Pemungutan BPHTB															

Lubuk Basung, Februari 2017
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

HENDRI.G.SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640216 199202 1 001

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam 5 (lima) tahun mendatang perlu ditetapkan indikator kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2017-2021. Tingkat keberhasilan pencapaian tersebut sangat didukung oleh profesionalitas seluruh jajaran organisasi, karena profesionalitas di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah merupakan faktor kunci yang dapat memajukan organisasi sehingga bias bergerak lebih cepat untuk menuju keberhasilan dalam merealisasikan program-program pembangunan yang diamanatkan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, sesuai pula dengan tugas dari perangkat daerah ini membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan.

Adapun indikator kinerja dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2017 - 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.276.502.600,00	3.869.740.800,00	3.623.982.800,00	3.723.982.800,00	3.823.982.800,00	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Output : Lancarnya sarana Komunikasi dan sarana Penerangan		61.062.000,00	89.800.000,00	104.800.000,00	119.800.000,00	134.800.000,00	
		Indikator Outcome : Tepenuhinya Informasi Komuniksai dan Data							
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indikator Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor DPPKA		239.705.850,00	188.934.800,00	203.934.800,00	218.934.800,00	233.934.800,00	
		Indikator Outcome : Tersedianya pelayanan Perkantoran secara Optimal							
3	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Indikator Output : Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi		852.032.000,00	673.460.650,00	688.460.650,00	703.460.650,00	718.460.650,00	
		Indikator Outcome : Terpenuhiya Kebutuhan Operasional Perkantoran							

4	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Indikator Output : tersedianya Penunjang operasional Administrasi Perkantoran		427.079.750,00	1.543.337.350,00	1.558.337.350,00	1.573.337.350,00	1.588.337.350,00	
		Indikator Outcome :Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Perkantoran							
5	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Indikator Output : Tersedianya Operasional Jasa Perkantoran		549.338.000,00	953.450.000,00	968.450.000,00	983.450.000,00	998.450.000,00	
		Indikator Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Perkantoran							
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indikator Output : Indikator Outcome : Terpenuhinya secara bertahap kebutuhan sarana dan prasarana kantor		147.285.000,00	420.758.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	150.000.000,00	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				432.150.450,00	-	400.000.000,00	400.000.000,00	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas	Indikator Output : tersedianya kendaraan dinas Ops SKPD			432.150.450,00		400.000.000,00	400.000.000,00	

		Indikator Outcome : Terwujudnya kelancaran Ops SKPD							
III	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			5.376.401.850,00	6.696.558.452,00	6.936.558.452,00	7.176.558.452,00	7.416.558.452,00	
1	Penyusunan Standar Satuan Harga	Indikator Output : Buku HSBJ,DRKBU, DRKPBU,DKBU dan DKPBU		83.324.350,00	163.355.000,00	178.355.000,00	193.355.000,00	208.355.000,00	
		Indikator Outcome : Terselenggaranya keseragaman satuan harga dalam penyusunan RKA dan DPA							
2	Penyusunan Ranperda tentang APBD	Indikator Output : Buku HSBJ,DRKBU, DRKPBU,DKBU dan DKPBU		473.849.500,00	489.005.000,00	504.005.000,00	519.005.000,00	534.005.000,00	
		Indikator Outcome : Terselenggaranya keseragaman satuan harga dalam penyusunan RKA dan DPA							
3	Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Indikator Output : tersedianya informasi keuangan daerah/dokumen keuangan daerah		595.004.000,00	493.671.500,00	508.671.500,00	523.671.500,00	538.671.500,00	

		Indikator Outcome : terlaksananya pengelola keuangan daerah							
4	Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah	Indikator Output : Laporan Aset tetap		226.714.500,00	269.299.900,00	284.299.900,00	299.299.900,00	314.299.900,00	
		Indikator Outcome :Terlaksananya Manajemen barang milik daerah							
5	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- sumber Pendapatan Daerah	Indikator Output : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		250.442.500,00	546.600.952,00	561.600.952,00	576.600.952,00	591.600.952,00	
		Indikator Outcome : Peningkatan Pendapatan Daerah							
6	Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan	Indikator Output : Perda Bupati ttg pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan		37.033.650,00	60.764.800,00	75.764.800,00	90.764.800,00	105.764.800,00	
		Indikator Outcome : Tepatnya sasaran pembayaran bantuan keuangan sesuai Peraturan Bupati							
7	Pengelolaan Belanja Daerah	Indikator Output : Terbitnya SP2D SKPD, Pembinaan Bendahara Pengeluaran		854.402.400,00	342.773.500,00	357.773.500,00	372.773.500,00	387.773.500,00	

		Indikator Outcome : Lancarnya Proses Pengeluaran daerah							
8	Peningkatan Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Indikator Output : Terlatihnya tenaga akuntansi SKPD dan PPKD dalam penyusunan laporan keuangan		127.303.000,00	320.069.000,00	335.069.000,00	350.069.000,00	365.069.000,00	
		Indikator Outcome :Laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan pemerintah daerah							
9	Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	Indikator Output : Pelaksanaan Intensifikasi Pemungutan PBB		942.965.000,00	760.060.000	775.060.000,00	790.060.000,00	805.060.000,00	
		Indikator Outcome : Peningkatan Pendapatan Asli daerah							
10	Pendayagunaan Aset	Indikator Output : Premi Asuransi Barang Milik Daerah, daftar Aset yang dihapus		808.422.050,00	1.411.532.000,00	1.426.532.000,00	1.441.532.000,00	1.456.532.000,00	
		Indikator Outcome : terlaksananya pengamanan barang milik daerah							
11	Peningkatan dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Indikator Outcome : terlaksananya pemungutan pajak dan retribusi daerah		236.231.000,00	165.169.900,00	180.169.900,00	195.169.900,00	210.169.900,00	

		Indikator Output : terpungutnya pajak dan retribusi daerah							
12	Penyusunan Laporan dan evaluasi Pendapatan	Indikator Output : terpungutnya pajak dan retribusi daerah		200.492.000,00	172.775.500,00	187.775.500,00	202.775.500,00	217.775.500,00	
		Indikator Outcome : Laporan pendapatan Kabupaten Agam							
13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Indikator Output :Tersedianya Perda Perhitungan APBD, Perbup ttg Perhitungan APBD dan laporan		226.726.900,00	414.800.000,00	429.800.000,00	444.800.000,00	459.800.000,00	
		Indikator Outcome : 300 buah buku							
14	Pemutakhiran Data PBB-P2	Indikator Output : Tersedianya Data dan informasi PBB- P2		158.476.000,00	261.489.800,00	276.489.800,00	291.489.800,00	306.489.800,00	
		Indikator Outcome : Tersedianya data PBB-P2 yang Up to Date							
15	Sosialisasi dan Bintek Standar Akuntansi Pemerintahan	Indikator Output : Terlaksananya Pengelolaan Keuangan SKPD yang sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan		56.195.000,00	375.212.050,00	390.212.050,00	405.212.050,00	420.212.050,00	
		Indikator Outcome : Terlatihnya Pengelola Keuangan SKPD							

16	Pengelolaan data PBB P2 dan BPHTB	Indikator Output : Peningkatan Pendapatan Asli daerah		98.820.000,00	449.979.550,00	464.979.550,00	479.979.550,00	494.979.550,00	
		Indikator Outcome : operasional Peningkatan Pemungutan BPHTB							

Lubuk Basung, Februari 2017
BADAN KEUANGAN DAERAH

HENDRI.G.SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640216 199202 1 001

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017-2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dan sinergisitas dengan pemangku kepentingan dengan harapan bahwa renstra ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dalam memperkuat pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Terpilih. Dengan telah disepakati renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada unit kerja masing-masing.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam harus dapat meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal, vertical maupun horizontal dengan berbagai pihak dengan pertimbangan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan demikian maka Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam dan juga sebagai pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan LKj SKPD. Selain itu Renstra yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari, oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga **"Pengelola Keuangan Yang Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel Dalam Rangka Terwujudnya Kabupaten Agam Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas"** dapat tercapai.